







# TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ALAT BUKTI SUMPAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA

## ABSTRAKSI

Lembaga Peradilan adalah suatu Lembaga andalan masyarakat untuk mencari keadilan terhadap hal-hal yang menimpa dirinya dan dirasakan kurang memberikan rasa keadilan atau bahkan tidak sama sekali dan cenderung merugikan.

Keberadaan Lembaga ini adalah merupakan amahan konstitusi di setiap negara yang jumlah dan lokasinya ditentukan dengan Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugasnya, peran hakim adalah sangat menentukan dan independen, pengetahuan serta ketajaman dalam mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam sidang adalah sangat dibutuhkan sehingga pada gilirannya akan melahirkan suatu keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan secara maksimal.

Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang sebagian besar hukum yang berlaku adalah mengiklbat pada hukum Barat (Belanda), maka hukum Perdata dan Acaranya termasuk dalam kategory tersebut.

Dengan adanya Pengadilan Negeri yang melayani masyarakat secara umum di bidang Pidana dan perdata dan adanya Pengadilan Agama yang mempunyai layanan khusus dalam bidang hukum keluarga Islam dan Ekonomi Syari'ah, maka sudah barang tentu



Hukum Acaranya sedikit banyak mengikuti Hukum Acara yang ada di Pengadilan Negeri.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum adalah : HIR, R.BG. Rsv, BW, UU. No. 2 Th. 1986 tentang Peradilan Umum.

Sedangkan yang berlaku bersama-sama dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah : UU No. 14 Th 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU. No 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU. No. 1 Th. 1974 dan PP. No. 9 Th. 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya.

Dalam menjalankan tugas pokok Pengadilan yaitu : Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, Hukum Acara memegang peranan penting, mulai dari mengajukan surat gugatan atau permohonan, pemeriksaan pihak-pihak yang berperkara, pembuktian, musyawarah majlis hakim dan pengambilan keputusan.

Pada tahap pembuktian, para pihak berupaya meyakinkan hakim bahwa pihaknya adalah pihak yang paling benar dengan mengemukakan alat-alat bukti yang dimiliki. Alat-alat bukti tersebut berupa : Alat bukti tulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat atau keterangan ahli.

Disisi lain, Hukum Islam mempunyai hukum perundang-undang yang lengkap yang berseumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia dimuka bumi ini termasuk di dalam-nya adalah peradilan.

Dalam kaitannya dengan alat bukti sumpah yang terdapat dalam hukum Acara Perdata, Hukum Islam dijadikan landasan untuk mengkaji secara teoritis tentang fungsi pembuktiannya dalam perkara-perkarakeperdataan.

## SEKAPUR SIRIH

Para pembaca yang budiman, buku sederhana ini mencoba membedah fungsionalisasi sumpah dalam ranah lembaga peradilan khususnya yang terkait dengan perkara keperdataan.

Sumpah sebagai ungkapan yang sesungguhnya dari dalam hati seseorang adalah representasi dari makna batin untuk mengemukakan sesuatu yang ia rasakan, alami dan lakukan terhadap sesuatu yang ia pertahankan eksistensinya dalam suatu proses komunikasi masyarakat.

Islam sebagai agama samawi memberikan syarat dibenarkannya sumpah sebagai alat bukti terhadap perkara yang dijadikan sumpah ada dua: *Pertama*, merupakan sesuatu yang akan datang (belum terjadi). *Kedua*, perkara yang dijadikan sumpah itu termasuk sesuatu yang mungkin terjadi saat ia mengucapkan sumpahnya.

Dalam Khazanah Hukum Acara Perdata di Indonesia, pihak-pihak yang berperkara dimungkinkan menggunakan sumpah sebagai alat bukti, baik berupa *sumpah pemutus* atau yang menentukan suatu perkara dimenangkan oleh salah satu pihak berdasarkan sumpah tersebut, *sumpah penaksir* atau yang dengan sumpah tersebut ganti kerugian salah satu pihak ditentukan dan sumpah pelengkap atau dalam kondisi tertentu berdasarkan alat bukti yang ada, hakim membutuhkan penguatan keyakinannya dari para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam menentukan dictum-diktum putusan perkaranya.

## MOTTO

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibn Abbas ra berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW.,  
bersabda: Keterangan (alat bukti) adalah wajib atas orang yang  
menggugat dan sumpah adalah bagi orang yang mengingkari  
(gugatan). (HR. Baihaqi)



# DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	v
SEKAPUR SIRIH .....	vii
MOTTO .....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

## BAB I. SUMPAH DALAM ISLAM

A. Dinamika Alat bukti Sumpah dalam Proses Peradilan.....	1
B. Definisi Pembuktian, Alat Bukti Sumpah dan Macam-Macamnya.....	5
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Sumpah.....	20
D. Masalah-Masalah Yang Memerlukan Alat Bukti Sumpah.....	26
E. Status Keputusan Hakim Bila Datang Alat Bukti Yang Lebih Kuat Setelah Sumpah.....	31

## BAB II. ALAT BUKTI SUMPAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Definisi Alat Bukti Sumpah dan Macam-Macamnya.....	35
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Sumpah.....	46
C. Masalah-masalah yang Memerlukan Alat Bukti Sumpah.....	50

D. Status Keputusan Hakim Bila Datang Alat Bukti Yang Lebih Kuat Setelah Sumpah.....	53
--	----

### **BAB III. ANALISA**

A. Pengertain Alat Bukti Sumpah.....	55
B. Dasar Hukum Sumpah.....	56
C. Masalah-Masalah Yang Memerlukan Alat Bukti Sumpah.....	56
D. Status Keputusan Hakim Bila Datang Alat Bukti Yang Lebih Kuat Setelah Sumpah.....	58

<b>BAB IV. KESIMPULAN .....</b>	<b>60</b>
---------------------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
----------------------------	-----------

# BAB I

## ALAT BUKTI SUMPAH

### A. Dinamika Alat bukti Sumpah dalam Proses Peradilan

Manusia sebagai makhluk Allah SWT., yang paling sempurna, dalam hidupnya selalu mendambakan keharmonisan dan kebahagiaan. Begitu pula halnya dengan ummat Islam, hal ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 2: 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Namun tidak jarang bahwa ketentraman yang di rasakan, tiba-tiba berubah menjadi suatu permusuhan karena kesalahan atau pelanggaran yang menyebabkan kerugian harta benda orang lain dan menyeretnya ke proses lembaga peradilan.

Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak seseorang,

penyelesaian hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu gugatan yang disamapikan ke pengadilan, harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: Adanya pihak-pihak yang berperkara, adanya hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak dan adanya isi tuntutan. Setelah perkara dillimpahkan ke pengadilan, proses selanjutnya yang sangat penting adalah pengadaan saksi dan atau alat bukti, baik dari pihak penggugat maupun tergugat yang gunanya untuk memperkuat gugatannya atau mempertahankan haknya.



Keharusan untuk memperoseh keterangan dari pihak-pihak yang berperkara semaksimal mungkin bagi hakim ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut :

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضى (رواه أحمد)<sup>1</sup>

Artinya : Dari Ali ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW., berdsabda: Apabila dua orang menyerahkan perkara (untuk kamu adili) kepadamu, maka janganlah kamu putuskan (menangkan untuk penggugat, sehingga engkau mendengar keterangan pihak-pihak lain, niscaya kamu mengetahui bagaimaa (seharusnya) kamu memutuskan. (HR. Akhmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap perkara yang akan di putuskan memerlukan alat bukti. Adapun yang dinamakan bukti adalah :

حُجَّةٌ تُؤَكِّدُ الدَّعْوَى<sup>2</sup>

Artinya : setiap alasan yag dapat memperkuat dakwaan/gugatan.

Dengan kata lain alat bukti adalah "Alat atau upaya yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara"<sup>3</sup>.

Alasan atau upaya tersebut bersumber dari keterangan saksi, baik secara tertulis, pengakuan maupun sumpah. Dalam hal ini Rasulullah memberikan gambaran tentang kedudukan kesaksian dan sumpah dalam proses pembuktian di Pengadilan, sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Akhmad bin Hanbal, *Musnad*, Jilid I, (Beirut ; Darush Shādir, 2002), hal. 150.

<sup>2</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qodlā'u Fīl Islām*, (Beirut ; Darun Nahdoh Arabiyah, 2004), hal. 74

<sup>3</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta: CV, Rajawali, 1999), hal. 145

Artinya : dari Ibnu Abbas Ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda : Keterangan itu dibebankan pada penggugat sedang sumpah pada tergugat. (HR. Baihaqi).

Dalam proses perkara di Pengadilan, bila penggugat menggugat tanpa disertai alat bukti, ia berhak memerintah tergugat untuk bersumpah sebagai penolakan atas gugatannya. Apabila tergugat menolak untuk bersumpah tanpa disertai alasan yang sah secara hukum, tergugat dapat dikenai ta'zir sampai mau mengikat sumpah.

Sumpah dianggap sah bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Orang yang bersumpah adalah mukallaf, tidak dipaksa dan sengaja bersumpah;
2. Sumpahnya dilaksanakan atas nama Allah atau dengan sifat-sifat-Nya;
3. Perkara yang dikuatkan dengan sumpah itu tidak merupakan perkara yang tetap, tetapi termasuk perkara yang muhtamal (*ijtihadi*).<sup>5</sup>

Tegasnya sumpah dapat dikatakan sebagai alat bukti bila memenuhi kereteria sebagai berikut:

1. Pengangkat sumpah adalah mukallaf;
2. Tidak dalam kondisi terpaksa dan adanya unsur kesengajaan bersumpah;
3. Sumpah tersebut mengandung unsur penyebutan nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya;
4. Perkara yang diperkuat dengan sumpah bahkan merupakan perkara yang qath'i atau yang merupakan hak Allah semata.

Hukum Acara Perdata mengenal tiga macam alat bukti sumpah, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Sebagai berikut: HIR., menyebutkan ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti yaitu: Sumpah

---

<sup>4</sup> Abu Bakar bin Akhmad bin Husein bin Ali Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Shādir, tt.), Jilid X, hal. 252

<sup>5</sup> Minan Zuhri, *Syari'at Islam*, (Kudus ; Menara Kudus, 1995), hal. 382.



pelengkap (*Suppletoir*), Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*Decisoir*) dan sumpah penaksir (*Aestimotoir* atau *Schetting send*).<sup>6</sup>

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Sumpah pelengkap (*Suppletoir*, pasal : 155 HIR, dan 1940 BW).

Adapun sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi dasar putusan<sup>7</sup>.

Jadi sumpah ini tidak membatasi jenis perkara dan pihak yang diperintah untuk bersumpah adalah diperintahkan atas wewenang hakim, sedangkan yang mendapatkan tugas untuk bersumpah tidak mempunyai pilihan lain kecuali untuk mengikat sumpah atau menolaknya.

2. Sumpah Penaksir (*Aestimotoir*, pasal 155 ayat 2 HIR. Dan Pasal 1940 BW).

Suatu sumpah yang diperintah oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.<sup>8</sup>

Sumpah penaksir ini harus didahului dengan alat bukti yang sah, yang kemudian dengan alat bukti yang ada, hakim merasa perlu untuk meyakinkan kepatutan tuntutan penggugat, sehingga ia memerintah penggugat untuk bersumpah.

3. Sumpah Pemutus (*Decisoir*, pasal 156 HIR dan 1930 BW)

Sumpah pemutus juga disebut seumpah *decisoir* memutuskan persoalan, menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), Cet. Ke-6, hal. 154

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 154

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 154

<sup>9</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinana, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Alumni, 2006), Cet. Ke-9, hal. 66

Sumpah ini dapat dilaksanakan meskipun penggugat tidak mempunyai alat bukti sama sekali dan apabila berhubungan dengan pengangkat sumpah atau kedua belah pihak, bila sumpah pemutus diperintahkan kepada salah satu pihak atau dikembalikan kepada pihak lain dan tidak mau mengikat sumpah, maka dikalahkan. Sebaliknya bila pihak yang diperintah untuk mengangkat sumpah telah melaksanakan tugasnya, maka ia dimenangkan.

Dalam pelaksanaannya sumpah pemutus ini mempunyai beberapa nama yang dikaitkan penamaannya dengan agama atau kepercayaan sipengangkat sumpah tersebut. Bagi yang beragama Islam sumpah ini dinamakan "sumpah Pocong", bagi yang beragama katholik, sumpah ini dinamakan "Sumpah Mimbar" dan bagi yang beragama Budha sumpah ini dinamakan "Sumpah Klenteng".

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diketahui bahwa alat bukti sumpah dalam hukum Islam terdapat perbedaan dan persamaan dalam Hukum Acara perdata. Hal inilah yang melatar belakangi penulisan buku ini agar nantinya dapat mengambil kesimpulan yang benar dan dapat memberikan pencerahan kepada para pembaca yang budiman.

## **B. Definisi Alat Bukti Sumpah dan Macam – Macamnya**

Sebelum sampai pada pengertian alat bukti sumpah, perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian "Alat Bukti" dan "Sumpah". Dari kedua pengertian itu kemudian dirangkai menjadi satu pengertian sebagai berikut:

### **1. Alat Bukti**

Ibnu Qoyim mendefinisikan alat bukti yaitu:

البينة هي الحجة التي تؤكد الدعوى.<sup>10</sup>

Artinya : Setiap alasan yang dapat di perkuat dakwaan/gugatan.

---

<sup>10</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qodo'u Fil Islam*, Jilid I, (Bairut, Darun Nahdzah Al-Arabiyah, 2004), hal. 74



Sedangkan makna yang lain adalah alat atau upaya yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan.<sup>11</sup> Atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>12</sup>

Pembuktian juga memiliki dua dimensi arti, yaitu arti luas dan arti terbatas. Dalam pengertian arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat difahami bahwa alat bukti adalah suatu upaya atau alat yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara guna meyakinkan hakim dimuka sidang pengadilan.

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yakin: Meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. Zhann: Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).<sup>14</sup> Zhann ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau zhann itu nyata pula salahnya. Di dalam Kaidah Fiqhiyah disebutkan bahwa:

---

<sup>11</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1999), Cet. Ke-4, hal. 145.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 207

<sup>13</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 136

<sup>14</sup> *Ibid.*

لا عبرة بالظن اللين خطأ.

Artinya : Tidak sah menjadi pegangan zhan yang nyata salah.<sup>15</sup>

Zhann itu kalau masuk ke dalam golongan zhann yang kuat, maka dia dapat mengganti suatu keyakinan, apabila yakin itu sukar diperoleh.<sup>16</sup>

3. Syubhat: Ragu-ragu (terbukti 50%).
4. Waham: Sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti < 50%), maka pembuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat

memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW., lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.<sup>17</sup> Dalam Hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal.130

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Op. Cit., hal. 136

<sup>18</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 121-122



Esensi dari pembuktian dalam proses peradilan tidak lain adalah menggali kebenaran materiel dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga hakim memperoleh suatu keyakinan akan kebenaran dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Adapun sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, fuqaha memiliki pendapat yang beragam, sebagai berikut:  
Fuqoha berpendapat, bahwa alat bukti itu ada 7 macam:<sup>19</sup>

- a. *Iqrār* (pengakuan)
- b. *Syahādah* (kesaksian)
- c. *Yamīn* (sumpah)
- d. *Nukul* (menolak sumpah)
- e. *Qasāmah* (sumpah)
- f. Keyakinan hakim
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Ibnu Qayyim juga merincikan alat-alat bukti itu sebanyak dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut:

- a. Fakta yang bicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah;
- b. Pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat;
- c. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya;
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka;
- e. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan;
- f. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat;
- g. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat;
- h. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan;
- i. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah;
- j. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat;

---

<sup>19</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1998), hal.136

- k. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah;
- l. Saksi tiga orang laki-laki;
- m. Saksi empat orang laki-laki;
- n. Kesaksian budak;
- o. Kesaksian anak-anak dibawah umur (sudah mumayyiz);
- p. Kesaksian orang yang fasiq;
- q. Kesaksian orang non Islam;
- r. Bukti pengakuan;
- s. Pengetahuan hakim;
- t. Berdasarkan berita mutawatir;
- u. Berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadloh*);
- v. Berdasarkan berita orang perorang;
- w. Bukti tulisan;
- x. Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak;
- y. Berdasarkan hasil undian;
- z. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.<sup>20</sup>

Adapun Samir 'Aaliyah berpendapat bahwa alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. *Qarīnah*
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
- f. Pengetahuan hakim.

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa alat bukti itu ada empat, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Surat resmi.

<sup>20</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qodo'u Fil Islam*, Op. Cit., hal. 74-75

<sup>21</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*. Op. Cit., hal. 57

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hal. 328



Dari beberapa jenis alat bukti tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa cakupan macam alat bukti adalah sebagai berikut: *Iqrār* (pengakuan), *syahādah* (kesaksian), *yamīn* (sumpah), *nukūl* (menolak sumpah), *qasāmah* (sumpah), keyakinan hakim, *qarīnah*, surat resmi dan bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Berikutnya adalah akan mengkaji makna dari alat bukti sumpah yang merupakan bagian dari fokus kajian dalam tema ini sebagai salah satu alat bukti.

## 2. Sumpah<sup>23</sup>

Secara bahasa (Etimologi), sumpah berasal dari bahasa Arab, yaitu:

خَلَفَ ⑦ يَخْلِفُ ⑦ خَلَفًا أَوْ جَلَفًا, padanan kata: يَمِينٌ ⑦ يَمِينُ ⑦ - يَمِينًا yang artinya adalah: Bersumpah.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian sumpah secara terminologi adalah sebagai berikut:

a). Menurut Imam Taqiyuddin adalah:

اليمين هو تحقيق الأمر أو تأكيده بذكر الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته.<sup>25</sup>

Artinya: Menegaskan suatu perkara atau menguatkannya dengan menyebut (nama) Allah atau salah satu dari sifat-Nya.

b). Menurut Ali bin Muhammad Al - Jarjani adalah:

---

<sup>23</sup> Hal-hal yang terkait dengan sumpah:

*Pertama*, Syarat bagi yang bersumpah yaitu: 1) *Baligh*. 2) Berakal sehat. 3) Islam. 4)

*Kedua*, syarat yang terdapat pada perkara (objek) yang dijadikan sumpah. 1) Hendaknya merupakan sesuatu yang akan datang (belum terjadi). 2) Hendaknya perkara yang dijadikan sumpah itu termasuk sesuatu yang mungkin terjadi saat ia mengucapkan sumpahnya.

*Ketiga*, syarat pada *shighah* sumpah: 1) Hendaknya sumpah tidak disandarkan kepada makhluk. 2) Hendaknya tidak ada pemisah dengan jeda atau kondisi diam dan sejenisnya. 3) Hendaknya tidak ada kata pengecualian. *Ibid.*, hal. 507

<sup>24</sup> Abu Luwis, *Al-Munjid*, (Beirut: Darul Masyik, 2006), hal. 927

<sup>25</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Bandung: Syirkah Atta'awin, 2009), hal. 247

اليمين هو تقوية أحد طرفي الخير بذكر الله سبحانه وتعالى.<sup>26</sup>

Artinya: menguatkan salah satu dari dua khabar dengan menyebut nama Allah yang maha Tinggi.

c). Sa'di Abu Jaib:

اليمين هو عبارة عن عقد قَوِيٍّ به عزمُ الحَالِفِ على الفعل أو الترك.

Artinya: Sumpah adalah satu ungkapan dari sebuah akad yang dimaksudkan oleh orang yang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sebuah perbuatan.

Adapun Fuqaha mendefinisikan sebagai berikut:

اليمين هو يَشْمَلُ التعليقَ أيضا، وهو رِبْطٌ حصولِ جملةٍ بحصولِ مضمونِ جملةٍ أخرى.

Artinya: Sumpah mencakup ta'liq juga, yaitu mengkaitkan perolehan suatu tujuan dengan perolehan dari tujuan yang lain.<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa sumpah adalah meneguhkan atau meyakinkan suatu perkara dengan alat bukti dan hal-hal yang terkait dengan hal yang disengketakan disertai penyebutan nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatNya.

Berdasarkan pada beberapa rangkaian pengertian tersebut juga dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian alat bukti sumpah adalah alat atau upaya yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka sidang yang berupa sumpah. Sedangkan pembagian sumapah yang didasarkan pada ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkannya, tercermin dari perdatat Abdur Rahman Al-Jaziri, sebagai berikut:

<sup>26</sup> Syafif Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Singapura-Jeddah : Al-Haromain, 2007), hal. 259

<sup>27</sup> Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istihlalan*, cet. 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hal. 394-395



ينقسم اليمين إلى لغوي لا إثم فيه ولا كفارة عليه، وإلى منعقد وهي ما لها كفارة إذا حنث فيها، و غموث ما هي وفيها إثم ولا تنفع فيها الكفارة.<sup>28</sup>

Artinya: sumpah dibagi kepada sumpah *laghwi* (gurau) yang tidak mengakibatkan dosa dan tidak mengakibatkan kafarah bagi sipengangkat sumpah, *mun'aqidah* (sah) yaitu mengakibatkan denda apabila membatalkan obyek sumpah serta *Ghumus* (dusta atau palsu), yang mengakibatkan seseorang berdosa dan tidak memerlukan denda.

Dari pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa sumpah dapat dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

Pertama : Sumpah *laghwi* (Gurau)

اليمين اللغوي اليمين التي لا تتعلق بها الحكم.

Sumpah gurau ialah sumpah yang tidak berkaitan (terkena) hukum.

Yang mendasari sumpah ini adalah firman Allah dalam QS.Al-Baqoroh: 2: 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya : Allah tidak akan menghukum lantaran sumpah-sumpah guraumu, tetapi akan menghukum apa yang diperbuat oleh hatimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Lemah Lembut,

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa apabila suatu sumpah yang diangkat oleh seseorang tanpa adanya unsur kesengajaan atau karena latah saja dan dikemudian hari sumpah mengingkari objek sumpah tersebut, maka ia tidak wajib membayar denda sumpah.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Madzahibil Ar-Ba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, 2003), Jilid II, hal 58

عن عطاء ابن ميمون في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته, لا والله وبلى والله (رواه أبو داود).<sup>29</sup>

Artinya: Dari 'Atha'ibn Maimun ra., (berkata) tentang sumpah yang tidak disengaja, Aisyah ra., berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda: Yaitu ucapan seorang laki-laki dirumahnya, tidak, demi Allah dan ya, demi Allah. (HR. Abu Dawud)

Menurut Ibnu Abbas, sumpah yang tidak terkena hukum itu ialah bahwa seseorang bersumpah mengenai sesuatu perkara seperti yang ia katakan, tetapi sesuatu itu bukan seperti yang ia katakan. Maksudnya ia bersumpah mengenai sesuatu menurut prasangka dan keyakinannya, akan tetapi ternyata bahwa sesuatu itu tidaklah demikian.<sup>30</sup> Hukum sumpah *laghwi* ini adalah tidak berdosa dan tidak terkena *kafarat*, hal ini didasarkan pada firman Allah Swt., QS. Al-Baqarah :2 : 255.

Kedua : Sumpah Mun'aqadah (Sumpah yang sah)<sup>31</sup>

اليمين المتعقدة هي ان يحلف على امر في المستقبل بأن يفعله أو لا يفعله ثم يحنث في يمينه.

Sumpah Mun'aqadah ialah bahwa seseorang bersumpah mengenai sesuatu perkara (urusan), ia akan mengerjakannya pada masa yang akan datang atau tidakmelakukannya (meninggalkannya), kemudian ia melanggar sumpah tersebut.

<sup>29</sup> Abu Daud, *Suman Abi Daud*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 179

<sup>30</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawāi' al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, juz II, cet. XXIII, (Damsyiq: Maktabah al-Ghazali, 2000), hal. 563

<sup>31</sup> Sumpah Mun'aqadah dalam seremonial di tanah air kita, seperti sumpah yang diucapkan secara simbolis dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan, seperti sumpah pelantikan Presiden, Gubernur, PNS, dan lain-lain dan yang wajib membayar kafarat bila dilanggar isi sumpahnya. Adapun surat perjanjian yang bermaterai yang selalu dipergunakan dalam setiap akad, jika dalam tulisan perjanjian itu disebutkan kata-kata bersumpah dengan nama Allah (الله, بالله, والله), maka perjanjian itu termasuk kategori sumpah dan wajib kafarat. Tetapi jika tidak terdapat kata-kata sumpah, hanya kata-kata aku berjanji saja, hal itu tidaklah termasuk sumpah dan tidak ada kafarat baginya jika dilanggar, jika melanggarnya secara moral dikategorikan orang-orang yang tidak jujur.



Sumpah ini adalah sumpah yang benar-benar dikehendaki oleh si pengangkat sumpah tanpa adanya unsur paksaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 5: 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّرتُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al-Maidah: 5: 89)

Berdasarkan ayat di atas dapat dijabarkan bahwa sumpah yang sah dan menimbulkan akibat hukum tertentu adalah bila sumpah itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan dalam pengangkatannya
2. Adanya unsur penyebutan nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya
3. Dan adanya objek sumpah yang terjadi dimasa mendatang serta hal-hal yang tidak dilarang oleh agama.

Ketiga : Sumpah Ghumus (Palsu atau Dusta)

اليمين الغموس هي اليمين التي يتعمد فيها الانسان الكذب.

Artinya: Sumpah Ghamus ialah sumpah yang diucapkan oleh manusia dengan sengaja untuk berdusta.

Sumpah ini termasuk dalam kategori suatu perbuatan dosa besar, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر هي: الإشراف بالله ، و عقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس. (رواه البخاري)<sup>32</sup>

Artinya : dari Abdullah bin Amr ra. Bahwa sesungguhnya rasullah Saw. Bersabda bahwa dosa besar adalah : menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh dan sumpah palsu (HR. Bukhori).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa:

عن علقمة عن عبدالله قال الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران فليمينان اللذان يكفران فالرجل الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل والرجل الذي يقول والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعله والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله. (رواه دارالقطني)<sup>33</sup>

Artinya: Dari 'Alqamah dari Abdullah bahwa ia berkata: sumpah itu ada empat macam, yakni dua macam sumpah yang terkena kafarat dan dua macam lainnya tidak terkena kafarat. Adapun dua macam sumpah yang terkena kafarat ialah seorang yang bersumpah: Demi Allah aku tidak akan melakukan ini dan itu, tetapi ia melakukannya, atau seorang mengatakan: Demi Allah sungguh aku akan melakukan ini atau itu, tetapi ia tidak melakukannya. Sedangkan dua macam sumpah yang tidak terkena kafarat ialah sumpah orang yang mengatakan: Demi Allah aku tidak berbuat ini atau itu, pada hal sesungguhnya ia

<sup>32</sup> Abu Abillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Burdidzah bin Bukhori Al-Jufri, *Shokhikh Bukhori*, Jilid VII, (Turki: Maktabah Al-Islamiyah, 2006), hal. 228

<sup>33</sup> Dar al-Quthni, *Sunan ad-Dar Quthni*, Juz, IV, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), hal. 78



telah berbuat, atau seorang mengatakan: Demi Allah sesungguhnya aku telah mengerjakan ini atau itu, tetapi sama sekali ia tidak mengerjakannya. (HR. Darul Quthni)

Sumpah palsu merupakan perbuatan dosa besar, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW., berikut:

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنها قال جاء أعرابي إلى النبي ص م فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس، فقلت ما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. (رواه البخاري)<sup>34</sup>

Dari Abdullah bin Umar ra. "Bahwasanya seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW: "apa saja yang termasuk dosa-dosa besar itu?" Rasulullah menjawab: "Syirik kepada Allah". Kemudian apa lagi? Orang Arab itu bertanya. Rasulullah menjawab: "Durhaka terhadap kedua orang tua". Orang itu bertanya lagi, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab: "bersumpah palsu" aku bertanya: "apakah sumpah palsu itu?". Rasulullah menjawab: "yaitu sumpah yang diucapkan orang yang dengan sumpahnya itu ia mengambil sebagian harta seorang muslim, sedangkan ia berdusta dengan sumpahnya itu. (HR. Bukhori)

Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa para ulama memiliki pendapat yang beragam tentang اليمين الغموس (sumpah palsu). Menurut pendapat jumhur ulama bahwa sumpah palsu itu merupakan sumpah yang diinkari (tipu muslihat), licin, penuh dengan kedustaan, dan tidak didasari dengan keteguhan hati. Maka sumpah yang demikian tidak ada kafaratnya. Menurut al-Syafi'i, sumpah palsu itu merupakan sumpah yang diniatkan, sebab ia dilakukan dengan keteguhan hati, terikat dengan suatu masalah yang diberitakan, dan diucapkan dengan mengikutsertakan nama Allah, maka berlaku kafarat baginya.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-fikr, 2005), hal. 225

<sup>35</sup> Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Jami' Li Ahkami al-Qur'an*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmyiah, 1993 ), hal. 267.

Sayid Sabiq berpendapat bahwa sumpah dusta ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menipu orang lain, sebagai berikut:

<sup>36</sup> ويجب التوبة منها ، ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق

Artinya: Pelaku sumpah ini wajib bertaubat, membayar hak-hak kepada yang berhak, jika karena hak-hak itu terjadi penyelewengan hak.

Sedangkan sumpah menurut fungsinya ada tiga macam, dengan kata lain bahwa sumpah yang digunakan dalam berbagai hal dan atau dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai kapasitas yang berbeda, sebagai berikut:

Pertama : Sumpah Istidzhār ( sumpah tambahan)

Sumpah pelengkap ini merupakan alat bukti tambahan bagi gugatan yang telah dilengkapi dengan suatu alat bukti minimal, sehingga dengan sumpah tersebut hakim dapat lebih meyakini akan kebenaran gugatan penggugat atau penolakan tergugat. Dengan kata lain bahwa sumpah tambahan ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau untuk menambah keyakinan hakim.<sup>37</sup>

Dari status sumpah ini yang hanya menempati posisi tambahan, atau dengan kata lain sebagai suatu cadangan, bila hal yang inti tidak ada maka ia baru digunakan. Oleh karena itu, bila sumpah tambahan ini ternyata palsu, maka tidak akan mempengaruhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat dr. Wihbah Az-Zahili, sebagai berikut :

وليس ت هذه اليمين دليلا في الإثبات وإنما هي لزيادة التأكيد و الاطمئنان في إقناع

---

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Beirut : Barul Fikri, 2008), Jilid III, ha. 113

<sup>37</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum acara Peradilan Agama, Op. Cit*, hal 182



القاضي بصحة الأدلة المتقدمة إليه لأن القاضي يوجهها للاختياط.<sup>38</sup>

Artinya : sumpah ini bukan merupakan dalil untuk menetapkan suatu hak, kecuali hanya sebagai tambahan untuk memperkuat dan memenangkan serta mencukupkan hakim (dalam menyakini) kebenaran dalil-dalil yang disampaikan kepadanya.

Jadi semakin jelas bahwa sumpah Istidzar ini hanya sebagai pelengkap dari dalil-dalil yang telah disampaikan kepada hakim, serta merupakan wujud ketelitian hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Kedua : Sumpah Tergugat

Sumpah ini merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan bila penggugat dalam gugatannya tidak memiliki alat bukti sama sekali, sebagaimana sabda Rasulullah sebagaimana berikut :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. (رواه الترمذی)<sup>39</sup>

Artinya: dari Abdullah bin Amr bin Ash ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda dalam khutbahnya : Keterangan (alat bukti) itu dibebankan kepada penggugat, sedang sumpah itu dibebankan kepada tergugat (HR. Tarmidzi).

Ulama dalam hal inipun telah bersepakat bahwa sumpahnya tergugat merupakan alat bukti pemungkas dari gugatan penggugatan, bila gugatan tersebut tidak disertai alat bukti. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, sebagai berikut :

وإنما الأيمان فإنهم اتفقوا على إنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا لم يكن للمدعى بينة.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikri, 2004), Jilid VI, hal. 607

<sup>39</sup> Mihiyiddin bin Saadat Al- Mubarak bin Muhammad bin Atsir Al-Khajza, *Jami'ul Ushul fi Ahaditsirrasul*, (Beirut : Maktabah Al – Halwan, 2001), Jilid X, Hal. 183

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ( Indonesia : Darul Ikhyail Kutubil Arobiyah, tt), Jilid II, hal. 348

Artinya : dan adapun sumpah-sumpah tergugat, Ulama telagh sepakat dapat menolak gugatan terhadap tergugat bila penggugat memiliki alat bukti.

Ketiga : sumpah 'Alal Bat

Sumpah ini adalah suatu bentuk sumpah yang khusus digunakan sebagai alat bukti pada perkara yang berkenaan dengan perbuatan para pihak itu sendiri, hal ini sebagaimana kesepakatan ulama sebagaimana berikut:

كما أنهم اتفقوا على أن الشخص يحلف على البت (وهو القطع والجزم) في فعله إثباتاً أو نفياً لأنه يعلم خال نفسه ويطالع عليه.<sup>41</sup>

Artinya: Sebagaimana mereka bersepakat bahwa sumpah seseorang adalah memutuskan (yaitu menentukan dan memastikan) pada perbuatan yang ia kerjakan atau tidak ia kerjakan, karena ia mengetahui kondisi dirinya dan ia kemudian kemukakan dalam Sumpah.

Prinsip bahwa sumpah seseorang terhadap perbuatan atau suatu hal yang berhubungan dengan diri pribadinya, baik yang sifatnya membenarkan atau menolak akan mempunyai akibat hukum pasti dan tuntas. Dengan kata lain bahwa setelah salah satu pihak mengangkat sumpah, perkara menjadi selesai dan putusan didasarkan pada sumpah tersebut. Rasulullah SAW., dalam hal ini memberikan isyarat dalam sabdanya sebagai berikut:

<sup>42</sup>عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا رجل غلبني على أرض كانت لأبي. فقال: الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ فقال: لا. قال:

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Dmaskus : Darul Fikri, 1984), Jilid VI, Cet. Ke- 3 hal. 782

<sup>42</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Sunan Abu Daud*, Jilid III, (Indonesia : Maktabah Dahlan, 2008), hal. 221



فلك يمينه. قال: يا رسول الله ، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذاك. (رواه أبو داود)

Artinya : Dari 'Ilqimah bin Wail bin Hijr al-Hadromi, dari bapaknya ra., berkata: Seorang laki-laki Hadromi dan seorang laki-laki Kindah datang kepada Rasulullah SAW. Orang Hadromi berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya lelaki ini telah menguasai tanah ayah saya, maka orang Kindahpun berkata: itu tanahku aku kuasai dan aku tanami didalamnya, berkata, maka Rasulullah SAW., bersabda kepada orang Hadromi: Apakah kamu punya bukti? (orang Hadromi menjawab): Tidak, maka (Rasulullah SAW.) bersabda: Maka hakmu adalah (menyuruh) ia bersumpah (orang Hadromi) berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini (Kindah) orang durhaka, ia tidak mengindahkan sumpahnya dan tida wara' dari sesuatu, maka Nabi SAW., bersabda: Kamu tidak mempunyai hak kecuali itu (menyuruh tergugat) untuk bersumpah . (HR. Abu Daud)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa tanah yang disengketakan dan disampaikan kepada Rasulullah SAW., antara orang hadramaut dan orang Kindah diselesaikan dengan pengangkatan sumpah salah satu pihak, dalam hal ini adalah orang Kindah yang kemudian Rasul memutuskan gugatan tersebut berdasarkan isi sumpah salah satu pihak.

### C. Dasar hukum pelaksanaan sumpah <sup>43</sup>

Sumpah yang merupakan aktivitas syariah dan mempunyai akibat hukum tertentu bila diucapkan, dalam pelaksanaannya didasarkan pada beberapa indikasi nash, baik Alqur'an, hadis maupun kesepakatan ulama, sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Adapun ayat yang membicarakan sumpah sangat banyak dalam Alqur'an dan penggunaan kata dasarnya kadang kala dengan *Yamin*, *halaf*, *Qasam* atau dengan *syahadah* untuk arti yang sama, yaitu sumpah. Ayat-ayat tersebut antara lain: QS. Al-Baqarah: 2 : 224 - 225, QS. Al-Qalam: 68 : 10, QS. Al-Maidah: 5 : 53; QS. An Nur: 24 : 6, 7, 8, 22, 53, QS. Al-Taubah: 9 : 42, 56, 62, 74, 95, 96, QS. Al-Naml: 27: 49.

1. Al-Qur'an, diantaranya:<sup>44</sup> QS. Al-Baqarah: 2: 225, Al-Maidah: 5: 89, 106, al-Nahl: 16: 38, Ali Imran: 3: 77,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ

قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 2: 225)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُوهَـ

إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّرَ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٢٦﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka

<sup>44</sup> Ayat-ayat yang berkenaan dengan tema-tema sumpah di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) QS. Shaad (38) :44: Jangan melanggar sumpah;
- 2) QS. An Nabl(16):91: Dilarang membatalkan sumpah Setelah meneguhkan kaumnya;
- 3) QS. Al-Nahl (16) : 92, 94: Sumpah jangan dijadikan alat untuk menipu
- 4) QS. An Nur (24) : 6: Keharusan bersumpah bagi suami yang menuduh istrinya berzina;
- 5) QS. Al Baqarah (2) : 224: Jangan bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mengerjakan kebaikan;
- 6) QS. Al-Taubah (9): 107, QS. Al-Mujadalah (58): 16, Al-Munafiqun (63):2: Sumpah orang munafik itu hanya tipu muslihat ;
- 7) QS. Al-Taubah (9) : 12, 13: Orang-orang yang merusak sumpah;
- 8) QS. Al A'raf (7) : 21: Sumpah setan kepada Adam.



kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al-Maidah: 5: 89)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَخْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِءَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. (QS. Al-Maidah: 5: 106)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang

benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS. Al-Nahl: 16: 38)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS. Ali Imran: 3: 77)

Dari kelima ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sumpah seseorang tidak akan berakibat hukum sama sekali kecuali sumpah tersebut diucapkan dengan sengaja, diniatkan di dalam hati tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak lain. Demikian pula bila sumpah terucap karena adanya unsur permainan atau ungkapan yang tidak sebenarnya dari sipengangkat sumpah.

## 2. Hadis-hadis Nabi, sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه : الا إن الله ينهاكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت (رواه الترمذی)<sup>45</sup>

Artinya : Dari Abdillah bin Umar ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. mengetahui Umar Bin Khattab ketika berjalan di waktu malam di atas kendaraan ia bersumpah dengan nama ayahnya maka bersabda : ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah

<sup>45</sup> Abu Daud bin Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid III, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, 2008), hal. 222



melarang kamu untuk bersumpah dengan menyebut nama ayahmu, barangsiapa bersumpah hendaklah Dengan menyebut (nama) Allah atau hendaklah ia diam.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أثبت هو الذي خير (رواه مسلم)<sup>46</sup>

Artinya : Rasulullah SAW., bersabda : Sesungguhnya saya demi Allah, bila Allah menghendaki tidak bersumpah dengan sesuatu sumpah, maka saya melihat sesuatu yang lain itu lebih baik (dari objek sumpah), kecuali saya melaksanakan sesuatu yang lebih baik tersebut (HR. Muslim)

### 3. Ijma' Ulama

فأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها ووصفها في الأصل لتأكيد المفلوف عليه<sup>47</sup>

Artinya: Dan umat telah sepakat (berijma') tentang disyari'atkannya sumpah, ketetapan hukumnya dalam pokok (hukum agama) untuk menguatkan obyek sumpah.

Adapun sumpah yang memiliki akibat hukum tertentu, pelaksanaannya mempunyai beberapa syarat, sebagai berikut:

1. Pengangkat sumpah adalah orang yang mukallaf, hal ini berarti bahwa sumpah orang yang belum dewasa (mukallaf) adalah tidak sah, begitu juga dengan orang gila;
2. Pengangkat sumpah tersebut bebas menentukan pilihan, tidak dalam kondisi dipaksa oleh orang lain;
3. Pengangkat sumpah mempunyai kesengajaan dalam sumpahnya dan bukan bersumpah karena latah atau sendagurau;
4. Sumpah tersebut mengandung unsur penyebutan nama Allah atau salah satu dari sifatNya.

Kemudian ulama' bersepakat bahwa dalam sumpah yang ada unsur paksaan, maka pengangkat sumpah tidak wajib

<sup>46</sup> Imam Muslim, *Shokhikh Muslim*, Jilid II, (Indonesia : Darul Ikhyail Kutubil 'Arobiyah, 2002), hal 22.

<sup>47</sup> Ibnu al-Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VIII, (Mesir: Maktabah Al- Jumhuriyah Al- arabiyah, 2004), hal. 691

melaksanakan obyek sumpah dan tidak berdosa bila melanggarnya, sedang sumpah yang demikian adalah tergolong dengan sumpah yang tidak sah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq, sebagai berikut:

.....إلى أن اليمين المكره لا تنعقد خالفاً لأبي حنيفة<sup>48</sup>

Artinya : ..... bahwa sumpah yang dipaksa adalah tidak sah, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Kesepakatan ini didasarkan pada firman Allah SWT., dalam QS. al-Nahl: 17:106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ  
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya : "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

Meskipun Ayat tersebut hanya menyebut tentang paksaan dalam kekafiran saja, namun ia mencakup perbuatan hukum mukallaf secara keseluruhan yang dilandasi dengan unsur paksaan, maka digolongkan suatu perbuatan yang tidak sah.

Pengecualian hukum di atas juga didasarkan pada salah satu hadis Rasulullah SAW., sebagai berikut:

<sup>49</sup>عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع على أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه)

<sup>48</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III. *Op Cit.*, hal. 115

<sup>49</sup> Abu abdillah bin Muhammad bin Yazid Al- Kizwani bin Majah, *Sunan Ibin Majah*, Jilid I, (Mesir : Darul Fikri, 2003), hal. 695



Artinya : dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi SAW. Bersabda : Sesungguhnya Allah membatalkan dari umatku kesalahan lupa dan hal-hal yang dipaksakan. (HR. Ibnu Majah).

Pada hadis di atas terdapat kalimat : “ وما استكروها عليه ” yang artinya: Apa yang telah dipaksakan oleh mereka kepada orang lain. Hal ini menunjukkan kepada suatu keumuman makna, yang mencakup semua perbuatan mukallaf maupun tindakan untuk tidak berbuat dan termasuk didalamnya adalah bersumpah, apabila di dalamnya terdapat unsur paksaan maka secara otomatis tidak sah.

#### **D. Masalah-Masalah Yang Memerlukan Alat Bukti Sumpah**

Pola kehidupan umat Islam memiliki dinamika yang beragam, hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor miliu, pendidikan, adat-istiadat, geografis, dan lain-lain, tidak terkecuali masalah keperdataan yang timbul di antara mereka, begitu pula masyarakat muslim Indonesia. Dalam kaitannya dengan masalah keperdataan, sebagian dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian antara para pihak dan sebagian diselesaikan melalui proses hukum hingga selesai atau dikeluarkannya suatu putusan oleh pengadilan dalam proses lahirnya suatu keputusan. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah proses pembuktian dan salah satu dari alat bukti adalah Sumpah.

Dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang memerlukan alat bukti sumpah. ulama bersepakat bahwa sumpah, Ulama Bersepakat bahwa sumpah dapat digunakan sebagai alat bukti pada masalah-masalah kebendaan.

واتفق الفقهاء أيضاً على جواز اليمين في الأمور وما يؤول في المال فيحلف المدعى عليه إثباتاً أو نفيًا.<sup>50</sup>

Artinya : Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa sumpah (dapat digunakan sebagai alat bukti) dalam segala masalah

---

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hal. 609

kebendaan atau yang dapat dinilai dengan material atau kebendaan, maka disumpahlah tergugat untuk menetapkan (dakwaan) atau menolaknya.

Kesepakatan fuqoha ini hanya terbatas pada masalah-masalah kebendaan semata, baik benda dalam arti yang sebenar-benarnya maupun benda dalam arti lain, yaitu segala sesuatu yang dapat dinilai dengan material sebagai contoh: Hak waris, Nafkah istri atau anak dan lain-lain.

Adapun pada masalah keperdataan lainnya, ulama tidak bersepakat. Hal ini dapat dilihat dari pendapat mereka sebagai berikut :

فقال المالكية: إن التحليف غير جائز في النكاح فقط، لأنه يجب فيه الشهادة والإعلان، فإذا لم يوجد الشهود لم يصح النكاح، فلا يقبل فيه اليمين لتحقيق فيه التهمة والكذب ولأنه لو أقر<sup>51</sup> بالنكاح لا يثبت ولا يلزم.

Artinya: maka berkata pengikut Imam Malik, sesungguhnya penyumpahan dalam hal (sah tidaknya) suatu pernikahan tidak diperbolehkan, karena dalam pernikahan harus ada kesaksian dan pengumuman apabila dalam suatu pernikahan tidak ada saksi-saksi maka nikahnya tidak sah. Oleh karena itu tidak diterima sumpah untuk memastikan suatu tuduhan dan kedustaan. Dan karena kalau mengaku adanya suatu hubungan pernikahan tidaklah tetap dan tidak harus (diakui keabsahannya).

Adapun pengikut Imam Hanafi dan Hambali memberikan pengecualian sebagai berikut :

ويستثنى سبع مسائل التي لا يجوز فيها التحليف النكاح والطلاق والنسب والفء والإيلاء والعق والولاء والاستيلاء وزاد الحنابلة القود.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid., hal 609

<sup>52</sup> Lok . Cit.



Artinya : Dikecualikan tujuh masalah yang tidak boleh ada penyumpahan, yaitu: Nikah, thalak, nasab, harta rampasan dari penguasaan daerah baru, Pembebasan budak, Kepemilikan seorang budak, persaksian kelahiran, Madzhab Hanabilah menambahkan tentang kepemimpinan.

Hanafiah mengecualikan penggunaan sumpah dalam hal keperdataan pada tujuh masalah, antara lain: Masalah nikah, thalak, nasab, harta rampasan dari daerah yang baru ditaklukan, pembebasan budak, kepemilikan budak, persaksian kelahiran, dan Hanabilah menambahkan tentang hal kepemimpinan.

Adapun Syafi'iyah dan beberapa madzhab Syiah membolehkan penggunaan sumpah pada hal-hal yang dilarang penyumpahan menurut Hanafiah sebagai berikut :

ويجوز التحليف في هذه المسائل ويحلف المنكر في إثباتها أو نفيها.<sup>53</sup>

Artinya : Dan boleh penyumpahan dalam (masalah ini masalah yang dilarang penyumpahan menurut Hanafiah), boleh bersumpah orang yang mengingkari (isi Sumpah) dalam penetapannya atau peniadaannya.

Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى واليمين على من أنكر. (رواه البيهقي)<sup>54</sup>

Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda: Keterangan (alat bukti) itu dibebankan kepada penggugat sedangkan Sumpah itu dibebankan kepada tergugat.(HR. Baihaqi)

Bila penggugat mengajukan suatu gugatan, ia dibebani suatu kewajiban yang berupa pembuktian akan kebenaran gugatannya, dengan kata lain bila alat bukti yang disampaikan dalam sidang ternyata diterima oleh Hakim dan dapat

---

<sup>53</sup> Ibid., hal 610

<sup>54</sup> Abu Bakar bin Akhmad bin Husen bin Ali Al-Baihaqi, *as-Sunanul Kubro*, Jilid X, (Beirut : Darush Shodir, 2007 ), hal . 252

memperkuat gugatan, maka akan mewujudkan terkabulnya gugatan, sebaliknya bila penggugat tidak memiliki alat bukti sama sekali, maka ia masih mempunyai hak untuk memerintah tergugat untuk bersumpah yang nantinya akan menjadi dasar putusan.

Derajat sumpah dalam alat bukti secara hirarkis dapat dilihat dari pendapat Ibnu Rusyid sebagaimana berikut :

والقضاء يكون بأربع: بالشهادة ، وباليمين ، وبالنكول ، والإقرار أو بما تركب من هذه.<sup>55</sup>

Artinya: Dan memutuskan (perkara) adalah dengan empat (alat bukti), yaitu : Kesaksian, sumpah, penolakan sumpah, pengakuan, dan dengan akumulasi dari hal-hal tersebut.

Pendapat ini menunjukkan adanya suatu tingkatan derajat alat bukti yang secara otomatis memberikan indikasi bahwa bila terdapat alat bukti yang pertama, maka alat bukti berikutnya tidak dipergunakan.

Berikut ini rincian penjelasan beberapa jenis alat bukti :

#### 1. Kesaksian

Secara definitif kesaksian adalah :

إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.<sup>56</sup>

Artinya : Mengemukakan suatu berita yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan menggunakan kata bersaksi di pengadilan.

Alat bukti kesaksian ini melibatkan orang lain dalam suatu gugatan, di mana ia melihat kejadian suatu perkara yang di kemudian hari hal tersebut diajukan di pengadilan oleh salah satu pihak yang dirugikan sebagai suatu gugatan.

Dalam kesaksian ia mengungkapkan sesuatu yang benar tentang fakta yang ia ketahui di waktu tertentu yang fungsinya sebagai landasan dan bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara yang dimintakan penyelesaian kepadanya.

---

<sup>55</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, *Op. Cit*, hal. 346

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islami Wa Adillatulhu*, Jilid VI, *Op. Cit*, hal 556



## 2. Sumpah

Hal ini Sebagaimana telah diterangkan pada sub bab B.

## 3. Al-Nukūl (penolakan sumpah)

Hal ini terjadi apabila tergugat tidak mau bersumpah.<sup>57</sup>

Dengan kata lain bahwa bila penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan alat bukti, atau tidak dapat mendatangkan alat bukti kemudian ia menyuruh tergugat untuk bersumpah dan menolaknya, maka penolakannya itu merupakan alat bukti yang dapat dijadikan dasar keputusan hakim.

## 4. Al-Iqrār (Pengakuan)

Adapun secara terminologi adalah :

إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.<sup>58</sup>

Artinya : Pernyataan tentang adanya hak orang lain yang dikuasai olehnya.

Bila seseorang penggugat mengajukan suatu gugatan terhadap seseorang yang kemudian disebut tergugat, setelah melalui proses pembuktian tergugat mengakui akan kebenaran isi gugatan, maka hakim dapat menjadikan pengakuan sebagai alat bukti yang menjadi dasar putusan.

## 5. Qorīnah (Korelasi)

Adapun secara terminologi adalah:

كل أمانة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فبذل عليه.<sup>59</sup>

Artinya : Setiap perkara yang tampak berkorelasi dengan sesuatu yang tersembunyi dan menunjukkan adanya keterkaitan keduanya.

Qorīnah ini memberikan kemungkinan terakhir dalam pembuktian, bila tidak ada alat bukti saksi, sumpah penolakan Sumpah dan pengakuan, maka *qorīnah* merupakan suatu peluang terakhir dalam pembuktian dengan melalui pendekatan

hal. 130 <sup>57</sup> Hasbi Ash – Shidieqy, *peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung : PT. Al- Ma'arif, tt).

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VI, *Op. Cit*, hal 130

<sup>59</sup> *Ibid*.

hubungan perkara yang digugat dengan kejadian yang mengiringi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perkara atau kejadian yang jelas dan secara hukum dapat dijadikan dasar pembuktian.
- b. Adanya keterkaitan antara kejadian yang timbul dengan sesuatu yang digugat.

#### **E. Status Keputusan Hakim Bila Datang Alat Bukti Yang Lebih Kuat Setelah Sumpah**

Suatu gugatannya yang tidak disertai alat bukti, maka ia hanya mempunyai hak untuk menyuruh tergugat bersumpah. Sumpah yang dimaksud adalah sumpah yang isinya menerangkan penolakan isi gugatan sebagaimana dikehendaki penggugat. Rasulullah SAW., memberikan isyarat tentang hal tersebut di atas sebagai berikut:

اليمين على نية المستحلف. (رواه مسلم)<sup>60</sup>

Artinya : Sumpah itu tergantung pada orang yang memintanya. (HR. Muslim).

Pada intinya sumpah yang diangkat tergugat adalah gunanya untuk menolak gugatan yang ditujukan kepadanya.

Ada beberapa pendapat ulama tentang kedudukan keputusan hakim yang didasarkan pada sumpah tergugat, kemudian setelah itu ditemukan alat bukti yang lebih kuat dari sumpah, sebagai berikut:

Pertama, menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat dirubah, sebagai berikut :

وحكى عن ابن أبي ليلي وداود : أن بينته لا نسمع لأن اليمين حجة المدعى عليه ولا نسمع بعدها  
<sup>61</sup>حجة المدعى كما لا نسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعى.

Artinya: Disikisahkan dari Ibnu Abi Laila dan Dawud, bahwa sesungguhnya alat bukti, kami tidak mendengarkan

---

<sup>60</sup> Ibid., hal 25

<sup>61</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Muqhnī*, Jilid IX, *Op. Cit.*, hal 226



karena sumpah merupakan alat bukti bagi tergugat, maka kami tidak mendengarkan setelahnya alat bukti atau alasan penggugat sebagaimana kami tidak mendengarkan sumpah tergugat setelah adanya alat bukti penggugat.

Pendapat di atas menegaskan bahwa tergugat telah bersumpah atas permintaan penggugat dan dengan sumpah diputuskan suatu perkara, maka tidak diperlukan pembatalan keputusan dengan adanya alat bukti baru yang disampaikan oleh penggugat. Hal ini memberikan pengertian bahwa kebenaran masalah yang dimintakan pembuktian dengan sumpah menjadi pasti secara hukum dan pihak penggugat tidak dibenarkan untuk mencari alat bukti baru yang bertentangan dengan isi Sumpah tergugat.

Kedua, Jumhur Ulama berbeda dengan pendapat pertama sebagai berikut :

..... أن المدعى إذا ذكر أن بينه وبينه بعيده منه أو لا يمكن إحضارها أو لا يريد إقامتها فطلب  
اليمين من المدعى عليه أحلف له: فإذا حلف ثم أحضر المدعى بينة حكم له وبهذا قال الشريح  
<sup>62</sup> والشعب ومالك والنووي والليث والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق.

Artinya : ..... Sesungguhnya seorang penggugat bila menyatakan bahwa alat buktinya itu jauh atau tidak mungkin untuk menghadirkan atau tidak mau menunggunya, lalu ia meminta tergugat untuk bersumpah. Bila tergugat telah bersumpah kemudian penggugat mendatangkan alat bukti, maka keputusan akan didasarkan pada alat bukti tersebut, yang berpendapat demikian adalah Shahih Sya'bi Imam Malik, imam nawawi, Al- Laits, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Ishak.

Memperhatikan pendapat Jumhur ulama di atas dapat ditegaskan bahwa meskipun pada awalnya penggugat berkeberatan mendatangkan alat bukti, karena faktor jauhnya

---

<sup>62</sup> Ibid., hal. 226

atau faktor sulitnya yang akhirnya ia memutuskan tidak memakai alat bukti, kemudian menyuruh tergugat untuk mengangkat sumpah, dikemudian hari penggugat menemukan alat bukti baru, maka alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai landasan keputusan.

Sehubungan dengan pendapat Jumhur ulama tersebut di atas Wahbah Az- Zuhaili mengutip pendapat mereka juga sebagai berikut:

يترتب على حلف اليمين من المدعى عليه باتفاق الفقهاء إنهاء النزاع بين المتداعين وسقوط الدعوى، وكذلك انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال مطلقاً بل مؤقتاً إلى غاية إحضار البينة في رأى الجمهور فير المالكية فلا تبرأ ذمة المدعى عليه من الحق فتظل مشغولة به إلى أن يتمكن المدعى من إثبات دعواه بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات.<sup>63</sup>

Artinya : Fuqaha sepakat bahwa sumpah tergugat mempunyai dampak hukum secara hirarkis, yaitu menghilangkan perselisihan antara penggugat dan tergugat, jatuhnya gugatan, terputusnya permusuhan dan saling menuntut di waktu itu, namun tidak secara mutlak akan tetapi selama kemungkinan penggugat mendatangkan alat bukti menurut pendapat jumhur selain pengikut Imam Malik, maka tidak melepaskan tanggung tergugat dari haknya, akan tetapi masih berlaku sehingga kemungkinan penggugat untuk menetapkan gugatan dengan alat bukti lain.

Kesepakatan fuqaha kedua ini lebih memberikan rincian penyelesaian suatu gugatan setelah diangkatnya sumpah oleh tergugat, sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak
2. Jatuhnya atau ditolaknya gugatan
3. Terputusnya permusuhan dan saling menuntut pada saat itu

---

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Alillatuhu*, Jilid VII, *Op. Cit.*, hal. 607



4. Ketika hal di atas berlaku sampai kemungkinan penggugat mendatangkan alat bukti yang nilai pembuktiannya lebih tinggi dari sumpah.

Umar bin Khattab dalam kasus ini berpendapat:

البينة الصادقة أحب إلى من اليمين الفاجرة.<sup>64</sup>

Artinya : Alat bukti yang benar lebih aku sukai dari pada sumpah palsu.

Pendapat ini menegaskan bahwa kehadiran alat bukti yang benar adalah lebih diutamakan dari pada sumpah yang tidak menutup kemungkinan disusupi unsur kedustaan.

Disini lain Jumhur Ulamaupun masih memberikan ulasan berikut:

وحتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها، لأنها هي الأصل واليمين

هي الخلف ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف.<sup>65</sup>

Artinya: Sumpah itu adalah hujjah yang lemah, tidak memutuskan perselisihan, maka diterima bukti sesudahnya, bahwa bukti itulah yang pokok sedang sumpah mengikutinya, maka bila yang pokok telah datang, berakhirlah hukum yang mengikutinya.

Titik fokus pendapat Jumhur Ulama ini menekan pada tinjauan kedudukan sumpah itu sendiri, dimana sumpah digolongkan pada alat bukti yang lemah dari pada yang lainnya. Hal ini memberikan peluang kepada penggugat untuk mendatangkan alat bukti yang lain yang nilai pembuktiannya lebih tinggi dari alat bukti sumpah.

Setelah menyimak dua pendapat yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Jumhur Ulama adalah yang harus menjadi pedoman, karena merupakan cerminan yang mewakili sebagian besar ulama dan disisi lain Ulama merupakan panutan ummat.

<sup>64</sup> Ibnu al-Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IX, *Op. Cit*, hal. 227

<sup>65</sup> Sayid Sabiq, *Faqih Sunnah*, Jilid III, *Op. Cit*, hal. 345

## BAB II

# ALAT BUKTI SUMPAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA

### A. Definisi Pembuktian, Alat Bukti Sumpah dan Macam-Macamnya

Sebelum membahas pengertian alat bukti sumpah, perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian “Alat Bukti” dan “Sumpah”, dari kedua pengertian itu kemudian dirangkai menjadi satu pengertian, sebagai berikut :

#### 1. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>1</sup> M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>2</sup> Atau suatu proses bagaimana alat-alat bukti

---

<sup>1</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 50

<sup>2</sup> Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 1 April 2019



dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
  - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*;
  - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*;
  - 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 7

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op. Cit.*, hal. 127

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, diatasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.<sup>5</sup>

Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.<sup>6</sup> Asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

a. Asas *Ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. Asas *Audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak

---

<sup>5</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2013), Cetakan ke-2, hal. 44

<sup>6</sup> *Ibid.*



secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

c. Asas *Actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.

d. Asas *Affirmandi incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak, maka ia harus membuktikannya.

e. Asas *acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.<sup>7</sup>

f. Asas *Testimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti.

g. Asas *Unus testis nullus testis*

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op. Cit., hal. 153

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 .K/Sip/1973, yang menentukan: "Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian". Mengenai asas *testimonium de auditu* dan asas *unus testis nullus testis* akan dibahas lebih lanjut pada bagian alat bukti saksi di bawah ini.

Inilah beberapa asas-asas pembuktian yang dengan rambu-rambu ini diharapkan seorang hakim dapat melihat, memilih dan menentukan alat bukti mana yang mempunyai nilai kebenaran yang tinggi. Selanjutnya akan dibahas tentang alat bukti.

## 2. Alat bukti Sumpah

Alat bukti<sup>8</sup> adalah merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang

---

<sup>8</sup> Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, adalah sebagai berikut: 1) Bukti dengan tulisan, 2) Bukti dengan saksi, 3) Bukti dengan persangkaan, 4) Bukti dengan Pengakuan, 5) Bukti dengan Sumpah. Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), Cet. Ke- 1, hal. 133



memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.<sup>9</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa bukti dan alat bukti bermakna sebagai berikut: Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.<sup>10</sup>

Subekti berpendapat bahwa terminologi bukti dan alat bukti adalah sebagai berikut: Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: Bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.<sup>11</sup>

Abdul Kadir Muhammad menekankan pendefinisian alat bukti dari segi fungsinya, yaitu : Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-akta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.<sup>12</sup>

Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat

---

<sup>9</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 25

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 99

<sup>11</sup> Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 17

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 129

bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa bukti atau alat bukti adalah suatu bentuk upaya dari salah satu pihak atau keduanya untuk meyakinkan hakim dengan jalan menyajikan fakta-fakta baik berupa perkataan (dalam bentuk kesaksian, penjelasan dan sumpah), dokumen (dalam bentuk surat dan keterangan tertulis), dan material yaitu alat bukti fisik (selain alat bukti pada dokumen) yang mempunyai hubungan hukum dengan suatu gugatan di muka pengadilan.

### 3. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan 177 HIR, Pasal 182 – 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 – 1945 KUHPerdata, akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan sumpah adalah:

- a). Pernyataan yg diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan lain sebagainya);
- b). Pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar;
- c). Janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu).<sup>14</sup>

Adapun sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmad yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan Sifat Yang Maha Kuasa dari

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op. Cit., hal. 120

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Lentera, 2008), hal. 1244



pada Tuhan dan percaya bahwa apa yang diberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>15</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwasanya sumpah adalah suatu pernyataan seseorang tentang sesuatu dengan sesungguhnya, didasarkan pada kemahakuasaan Tuhan dan berkeyakinan akan mendapat balasan yang setimpal bila pernyataanya tidak benar.

Setelah dikemukakan definisi alat bukti dan sumpah, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti sumpah adalah suatu sumpah yang merupakan pernyataan yang sebenarnya berdasarkan kemahakuasaan Tuhan, yang dipergunakan oleh salah satu pihak sebagai alat bukti untuk menyakinkan hakim dimuka sidang.

Sedang sumpah sebagai alat bukti ada tiga macam, sebagai berikut:

1) Sumpah Pelengkap

Ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusan.<sup>16</sup>

Pada prinsipnya sumpah pelengkap ini merupakan alat bukti penyempurna dari alat bukti terdahulu yang telah disampaikan oleh salah satu pihak.

Sumpah yang didalamnya terdapat penyebutan nama Tuhan atau salah satu dari sifat-Nya, oleh pengadilan digunakan untuk menyelesaikan suatu gugatan yang diajukan kepadanya. Hal ini merupakan bentuk penyelesaian suatu masalah atau gugatan melalui pendekatan agama, dimana orang yang beragama dan beriman akan merasa takut menerima siksa dari Tuhan bila dalam sumpahnya ia berdusta.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), Cet, Ke-7, hal. 154

<sup>16</sup> *Loc. Cit.*

Retnowulan Susanto berpendapat bahwa apabila hakim yakin bahwa pihak yang akan dibebani sumpah penambah akan melakukan sumpah palsu, maka ia tidak akan memerintahkan pihak tersebut untuk bersumpah melainkan ia akan menolak gugatan tersebut.<sup>17</sup>

Jadi disisi lain ilmu hakim sangat diperlukan untuk mengetahui apakah sipengangkat sumpah itu akan melakukan suatu kebohongan atau akan melakukan suatu yang benar belaka, bila hakim meyakini bahwa pihak yang akan disuruh mengangkat sumpah akan melakukan suatu kebohongan dalam sumpahnya, maka hakim akan menolak gugatannya.

## 2) Sumpah Penaksir (Eastimatoir)

Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian, atau sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi.<sup>18</sup>

Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUHPerdara: Sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang amarnya adalah "sebelum memutus pokok perkara, membebaskan kepada penggugat suatu sumpah penaksir seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh penggugat di sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir".

---

<sup>17</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 64-65

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op. Cit., hal. 156



Pada prinsipnya sumpah penaksir ini sama dengan sumpah pelengkap, hanya pengkhususannya bahwa sumpah ini berfungsi untuk melengkapi suatu gugatan yang berhubungan dengan besarnya jumlah ganti rugi yang akan dikabulkan oleh hakim yang berupa uang.

Berikut ini suatu gambaran tentang perlunya sumpah penaksir. Bila seorang penggugat mengajukan suatu gugatan yang disertai alat bukti, namun menurut ketentuannya alat bukti tersebut belum lengkap atau belum memenuhi target yang telah ditentukan, maka bila tidak dimungkinkan lagi untuk memperoleh alat bukti lain dari yang telah ada, saat itu hakim dapat membebankan sumpah penaksir kepada penggugat agar jumlah kerugian yang dituntut dapat dikabulkan.

### 3) Sumpah Pemutus (Decisoir)

Secara terminologis, sumpah decisoir adalah sebagai berikut: Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.<sup>19</sup>

Sumpah ini berbeda dengan dua sumpah terdahulu, dimana dapat dilaksanakan atas permintaan salah satu pihak dalam hal ini penggugat, bila dalam gugatannya tidak disertai alat bukti sama sekali, sifatnya *Litis decisoir*, artinya menyelesaikan pokok perkara.

Pasal 156 HIR., menjelaskan tentang alat bukti ini, diantaranya adalah bahwa sipenggugat dapat mengangkat sumpah bila obyek sumpah berhubungan dengan perbuatan pribadinya atau berhubungan dengan perbuatan kedua belah pihak, pihak yang enggan mengangkat sumpah dapat mengembalikan kepada pihak lawan. Bila sumpah dikembalikan kepihak lawan dan ia menolak untuk bersumpah, maka ia dikalahkan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 159

Akibat mengucapkan sumpah *decisoir* ialah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu.<sup>20</sup>

Dengan demikian bahwa bila pengangkat sumpah telah dilaksanakan, maka akan menghasilkan nilai peristiwa obyek sumpah menjadi pasti kebenarannya dan dianggap benar adanya serta melarang pihak yang menyuruh bersumpah untuk mencari dan mendatangkan alat bukti baru yang bertentangan dengan isi sumpah.

Sumpah pemutus mempunyai beberapa nama sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo : Sumpah *decisoir* dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar (sumpah gereja) dan sumpah kelenteng.<sup>21</sup>

Sumpah pemutus adalah sumpah yang paling berat pelaksanaannya dibandingkan dengan sumpah-sumpah yang ada dalam Hukum Acara Perdata sebagai alat bukti, oleh karena itu ia mengambil bentuk yang sangat sakral dalam kehidupan manusia.

Berikut ini gambaran sumpah pocong yang dilakukan oleh seorang Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pocong berarti : Mayat yang dibalut kain kafan.<sup>22</sup>

Jadi orang yang mengangkat sumpah pocong, ia mengenakan kain kafan sebagaimana layaknya mayat yang tidak bernyawa. Kondisi yang demikian diciptakan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada pengangkat sumpah bahwa nantinya kalau ia telah meninggal dan telah berkain kafan, maka tidak ada artinya segala sesuatu yang ia miliki di

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 157

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 158

<sup>22</sup> DEPDIBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2010), Cet. Ke-13, hal. 691



dunia ini, melainkan amal baiknya sebagai infestasi yang akan dinikmati hasilnya di akhirat kelak.

#### 4. Dasar Hukum Pelaksanaan Sumpah

Dasar hukum sumpah yang berkaitan dengan masalah keperdataan adalah sangat banyak sekali, hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal sebagai berikut : pasal 155, 156, 157 HIR. Pasal 182, 183, 184, 185 dan 314 R. Bg. Serta pasal 1929 sampai dengan pasal 1945 BW.

Pasal diatas tidak akan dikutip secara keseluruhan, akan tetapi hanya beberapa pasal yang menjadi dasar utama dari sumpah dimaksud, sebagaimana berikut:

##### 1) Sumpah Pelengkap (*Supletoir*)

Dasar hukumnya adalah pasal 155 ayat 1 HIR. Dan pasal 1940 dan 1941 BW. Pasal 155 ayat 1 sebagai berikut: Jika kebenaran tuntutan atau kebenaran pembelaan atas itu tiada secukupnya terang, akan tetapi tidak pula hampa dari segala keterangan, dan sekali-kali tidak ada jalan akan meneguhkannya lagi dengan upaya keterangan yang lain, maka bolehlah hakim pengadilan Negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, supaya karena sumpah itu dapat di putuskan perkara itu.<sup>23</sup>

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa, sumpah ini diperintahkan kepada salah satu pihak oleh hakim karena jabatannya dalam suatu masalah yang sudah mempunyai alat bukti yang kurang sempurna, diharapkan dengan ditambah sumpah pelengkap ini nantinya pemeriksaan perkara menjadi selesai serta hakim dapat menjatuhkan putusan.

Dasar hukum kedua adalah pasal 1940 dan 1941 BW., sebagai berikut: Hakim dapat karena jabatan, memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara, untuk menggantungkan putusan perkara pada penyumpahan itu atau

<sup>23</sup> R. Tresna, *Komentar H. I.R.* (Jakarta ; Medya paramita, 1979), cet. Ke-8 hal. 157

untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan. Pasal 1941: ia dapat berbuat demikian hanya dalam dua hal:

- (1) Jika tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna;
- (2) Jika tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali tidak terbukti.<sup>24</sup>

Dalam pasal inipun penegasannya sama dengan pasal sebelumnya, dimana sumpah ini diperintahkan kepada salah satu pihak oleh hakim karena jabatannya untuk menggantungkan suatu putusan dengan syarat bahwa tuntutan atau tangkisan itu sudah mempunyai alat bukti yang kurang sempurna.

## 2) Sumpah Penaksir (*Eastimatoir*)

Dasar hukumnya adalah pasal 155 ayat 2 HIR. Sebagai berikut: Dalam hal yang kemudian itu Pengadilan Negeri harus menentukan jumlah uang, yang sehingga itulah penggugat boleh dipercayai karna sumpahnya.<sup>25</sup>

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa sumpah ini diperintahkan kepada penggugat oleh hakim karena jabatannya, dengan syarat bahwa gugatannya tersebut harus didahului dengan bukti awal yang kurang sempurna dan hakim dapat mepercayai akan kejujuran penggugat dalam sumpahnya.

Dasar hukum kedua adalah pasal 1940 dan 1941 BW. Sebagaimana dikemukakan di atas (no. 1).

## 3) Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

Dasar hukum pertama adalah pasal 156 HIR dan pasal 1930 BW. Adapun pasal 156 HIR., sebagai berikut:

- (1). Jika sekalipun tidak ada suatu keterangan untuk meneguhkan tuntutan atau pembalasan atas tuntutan itu, maka boleh juga salah satu pihak meminta kepada pihak

---

<sup>24</sup> Subekti dan Tjitro Sudibyo, *KUH. Perdata (BW)*, (Jakarta: Medya Paramita, 1986) Cet, Ke-XX, hal. 430

<sup>25</sup> R. Tresna, *Komentor H. I.R. Op-Cit*, hal. 157



lain akan bersumpah dihadapan hakim supaya karena sumpah itu dapat diputuskan perkara itu, asal saja sumpah itu berhubungan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak itu sendiri, yang kepada sumpahnya akan bergantung keputusan perkara itu.

- (2). Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka bolehlah pihak yang tiada mau bersumpah mengembalikan sumpahnya kepada lawannya.
- (3). Barang siapa disuruh bersumpah, tetapi enggan bersumpah sendiri atau enggan mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, ataupun barang siapa menyuruh bersumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan ia enggan bersumpah, harus dikalahkan.<sup>26</sup>

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa sumpah pemutus dapat dilaksanakan bila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak mempunyai alat bukti sama sekali pada gugatannya.
- b. Sumpah itu bersifat memutuskan perkara (*Litis-Decisoir*).
- c. Sumpah itu berhubungan langsung dengan perbuatan sipengangkat sumpah.
- d. Bila perbuatan itu berkaitan dengan kedua belah pihak, maka tergugat enggan bersumpah dapat mengembalikan sumpahnya kepada penggugat.
- e. Bila pihak yang kepadanya sumpah dikembalikan, ia enggan bersumpah dikalahkan.

Dasar hukum kedua adalah pasal 1930 BW., sebagai berikut: Sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan yang berupa apapun juga, selainnya tentang hal-hal yang para pihak tidak berkuasan mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkara bahkan juga apabila tiada upaya lain

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 158

yang manapun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu.<sup>27</sup>

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa sumpah pemutus dapat dipakai dalam segala perkara perdata, yang para pihak tidak kuasa mendatangkan alat bukti atau pengakuannya ditolak dan sumpah pemutus berlaku untuk semua tingkatan perkara.

Selain dasar hukum sumpah sebagai alat bukti yang telah dikemukakan di atas, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengangkat sumpah sehingga pengangkatan sumpahnya mempunyai akibat hukum sebagaimana yang ia inginkan, sebagai berikut:

Syarat yang khusus ditujukan untuk pengangkat sumpah adalah tidak ada, dalam hal ini akan dikembalikan kepada suatu syarat umum yang menerangkan tentang kecakapan seseorang untuk bertindak hukum, dimana mengangkat sumpah adalah salah satu tindakan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Dalam hal ini, rujukannya adalah pasal-pasal BW., yang menerangkan tentang kecakapan seseorang untuk berbuat hukum, sebagai berikut: Pasal 330 adalah : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>28</sup>

Jadi syarat berbuat hukum yang sah adalah bila seseorang telah mencapai usia 21 tahun atau belum mencapai usia tersebut tetapi telah menikah terlebih dahulu.

Pasal 426 adalah : Pelunakan dengan nama kepada seseorang belum dewasa diberikan hak-hak kedewasaan tertentu atas permintaan, sebelum dewasa boleh diberikan oleh pengadilan, apabila ia telah mencapai umur genap 18 tahun.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudiyo, *KUHP (BW)*, (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2006), Cet. Ke-26, hal. 429

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 98

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 135



Pasal 421 adalah : Sebelum dewasa boleh mengajukan permintaan akan surat pernyataan itu kepada presiden, apabila ia telah mencapai usia 20 tahun.<sup>30</sup>

Dari kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam keadaan tertentu seseorang yang belum dewasa kedudukan hukumnya dapat disamakan dengan orang dewasa. Maksudnya adalah agar ia secara hukum dapat bertindak hukum secara sah, dapat dipertanggung jawabkan serta dapat mengurus kepentingan nya sendiri.

Pasal 433 adalah : Setiap orang dewasa dan selalu sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengapuan karena keborosannya.<sup>31</sup>

Orang dewasa yang dapat bertindak hukum adalah mereka yang tidak menderita penyakit yang menghilangkan kecapakannya untuk bertindak hukum, begitu pula orang dewasa tersebut tidak mempunyai sifat yang meniadakan kecakapannya, seperti pemboros, juga mereka yang tidak dicabut haknya untuk bertindak hukum.

##### **5. Masalah –Masalah yang Memerlukan Alat Bukti Sumpah**

Dalam kaitannya dengan masalah yang memerlukan alat bukti sumpah, secara umum dapat dikemukakan bahwa masalah keperdataan yang dapat dipergunakan alat bukti sumpah antara lain kedua belah pihak adalah: Semua perselisihan mengenai hak milik, utang piutang atau warisan seperti disebutkan di atas, atau juga dinamakan juga perselisihan mengenai hak-hak perdata.<sup>32</sup>

Perkara keperdataan yang dapat mempergunakan alat bukti sumpah adalah pada perselisihan hak milik, hutang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 134

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal . 137

<sup>32</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 2007), Cet. Ke-18, hal. 7

piutang dan kewarisan. Secara rinci dapat di kemukakan sebagai berikut:

Hak milik menurut pasal 570 BW. : Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu kegunaan kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>33</sup>

Dengan demikian, maka milik adalah sesuatu yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk berbuat hukum terhadapnya, baik untuk memanfaatkan benda itu langsung, maupun dijual untuk kemanfaatan yang lain dengan catatan bahwa kebebasan untuk berbuat terhdap benda tersebut tidak melampaui kebebasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sedang utang piutang adalah uang yang dipinjamkan dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>34</sup>

Jadi utang yang dimaksud adalah dapat berupa piutang yang belum dibayar atau bayaran hutang yang tidak diakui oleh sipemberi hutang.

Adapun warisan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah (sesuatu) yang diwariskan, seperti harta, benda, nama baik, harta pusaka.<sup>35</sup>

Adapun yang sering menimbulkan masalah adalah apabila salah satu ahli waris ingin menguasai harta waris tanpa mau membagi-bagikan kepada ahli waris yang lain menurut undang-undang.

Maka pada hal-hal di atas, alat bukti sumpah dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa antara penggugat dan tergugat, baik sumpah tersebut sumpah pelengkap, penaksir maupun pemutus.

---

<sup>33</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KHUP. Op. Cit.*, hal. 166

<sup>34</sup> DEPDIBUT, *Kamus Besar Bahasa ndoneisa, Op. Ci.t*, hal. 1000

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 1008



Untuk mengetahui derajat pembuktian alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, dapat dilihat pada pasal 1866 BW., sebagai berikut : Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persengkataan, pengakuan, sumpah.<sup>36</sup>

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya sumpah merupakan alat bukti yang tingkatannya paling akhir, sehingga sebagian pakar hukum berpendapat bahwa sumpah bukan merupakan alat bukti, maka dari itu sebaiknya Hukum Acara Perdata dirubah sedemikian rupa, sehingga dua hal itu tidak lagi disebut sebagai alat bukti.<sup>37</sup>

Sumpah yang diucapkan penggugat maupun tergugat juga sangat berpeluang untuk disisipi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pencari keadilan.

Apabila diperhatikan secara seksama, dari pasal 1866 BW., tersebut di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa alat bukti yang utama adalah alat bukti tulis, namun bila tidak terdapat alat bukti tulis, maka pihak yang dibebani pembuktian dapat mencari atau menghadirkan orang yang melihat peristiwa atau sesuatu yang disengketakan dalam hal ini dikategorikan sebagai keterangan saksi. Bila kedua hal tersebut tidak diperoleh, maka ia dapat membuktikan dengan alat bukti ketiga, yaitu dengan mengadakan pembuktian pada peristiwa yang dimaksud, sebagai contoh adalah suatu perusahaan makanan menitipkan jenis produknya ke toko pengecer, berdasarkan suatu kebiasaan yang saling percaya, dalam tempo tertentu pihak perusahaan makanan melalui salesnya menagih sejumlah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun pihak pengecer mengingkari akan penerimaan barang tersebut. Maka bila tidak memungkinkan untuk membuktikan secara langsung, diusahakan pembuktian dengan suatu pendekatan persangkaan atau kemungkinan. Dalam hal ini dapat dilakukan, bila pembeli tidak lama kemudian menjual

---

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHP. Op. Cit.*, hal. 419

<sup>37</sup> R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2002), hal.

makanan yang diproduksi oleh penggugat kepada konsumen, maka bila peristiwa ini dapat dibuktikan oleh hakim akan kebenarannya, dapat disimpulkan bahwa terbukti suatu perkara dengan melalui peristiwa-peristiwa yang menyertainya, yang kemudian dinakanakan "Persangkaan".

Adapaun suatu peristiwa dimana seorang penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan yang disertai alat bukti yang lengkap, setelah melalui tahap pembuktian dan dikemukakan alat-alat bukti yang diperlukan dan tergugat mengakui tanpa adanya suatu upaya untuk mengajukan suatu alat bukti yang mungkin ia miliki, maka pengakuannya terhadap gugatan dan alat bukti yang dikemukakan oleh penggugat tentang kebenarannya, juga disebut sebagai alat bukti "pengakuan".

Pada bagian akhir ini adalah bila alat-alat bukti yang diperlukan tidak memenuhi target, hakim karena jabatannya dan karena kewenangannya dapat nenerintah salah satu pihak yang berperkara untuk bersumpah demi melengkapi alat bukti yang dibutuhkan. Demikian pula seorang penggugat mengajukan gugatannya tanpa disertai alat bukti sama sekali, maka ia dapat memerintahkan tergugat untuk bersumpah, yang dengan sumpahnya itu akan dijadikan sebagai dasar keputusan perkara.

#### **6. Status Keputusan Hakim Bila Datang Alat Bukti yang Lebih Kuat Setelah Sumpah**

Pada sub bab terdahulu dikemukakan macam-macam alat bukti menurut BW atau KUHPdt, dan hirarkis pemakainya, selanjutnya timbul suatu masalah baru yang berkenaan dengan putusan hakim yang didasarkan pada alat bukti sumpah, dikemudian hari ditemukan alat bukti yang lebih tinggi nilai pembuktiannya dan kedudukannya dari sumpah tersebut. Apakah keputusan itu akan tetap kekuatan hukumnya atau mengalami perubahan atau diadakan peninjauan kembali setelah ditemukan alat bukti yang baru tersebut.



Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., berpendapat bahwa kekuatan pembuktian sumpah *eastimatoir* ini sama dengan sumpah *suppletoir* : bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.<sup>38</sup>

Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa setelah pelaksanaan sumpah penaksiran dan sumpah pelengkap, hakim dapat memutuskan perkara yang sedang disengketakan, namun bila' dikemudian hari ditemukan alat bukti yang lebih kuat dari sumpah dan sifatnya menentukan, maka hal ini dapat diajukan sebagai alasan untuk diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Adapun sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus sangat berbeda dengan apa yang telah dikemukakan atau sumpah pelengkap dan penaksir. Sumpah pemutus ini menghendaki kebenaran pasti terhadap hal-hal yang dimentahkan dengan pembuktian sumpah ini.

Akibat pengucapan sumpah *decisoir* adalah bahwa kebenaran yang di dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa Sumpah itu palsu....., sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan yang berarti bahwa deferent harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lain.<sup>39</sup>

Dari pendapat di atas didapat gambaran bahwa hal-hal yang dimintakan sumpah pemutus akan dianggap oleh Hakim sebagai suatu kebenaran yang pasti, di sisi lain pihak yang meyakini sumpah tersebut adalah palsu, tidak diberi wewenang untuk membuktikan Kepalsuan sumpah tersebut. Demikian pula memutus yang palsu tidak berpengaruh terhadap pemutus hakim, sedangkan akibat langsung dari Sumpah pemutus palsu ini adalah bahwa pihak deferent atau yang menyuruh bersumpah dikalahkan.

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op. Cit., hal. 156

<sup>39</sup> *Ibid.*,

### BAB III

## ALAT BUKTI SUMPAH DALAM APLIKASI

Setelah mengkaji sumpah sebagai alat bukti menurut hukum Islam dan Hukum Acara Perdata pada bab-bab terhadulu, maka sampailah pada bab-bab analisis yang akan menganalisa sumpah sebagai alat bukti, sebagai berikut:

#### A. Pengertian Alat Bukti Sumpah

Dalam hukum Acara Perdata yang dimaksud alat bukti sumpah adalah suatu pernyataan yang sebenarnya berdasarkan kesucian dan kemahakuasaan Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci serta dipergunakan oleh salah satu pihak sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di muka sidang, adapun sipengangkat sumpah menyatakan bersedia menerima balasan dari Tuhan bila pernyataanya dusta.

Pada daarna pengertian ini sama dengan apa yang dimaksudkan dalam hukum Islam hanya berbeda sedikit redaksi kata-katanya, sebagai berikut : "Sumpah yang dipergunakan sebagai alat bukti adalah suatu pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pihak dengan sesungguhnya tentang suatu perkara yang disengketakan dengan dilandasi penyebutan nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan perkara guna meyakinkan para hakim".



## **B. Dasar Hukum Sumpah**

Dasar hukum sumpah dalam Hukum Acara Perdata di maksudkan adalah dasar hukum tiap-tiap jenis sumpah, sebagai berikut :

1. Sumpah pelengkap, hal ini terdapat pada pasal ; 155 (1) HIR. 128 R. Bg. 1940. 1941 BW.
2. Sumpah penaksir, pasal-pasal yang menerangkan jenis sumpah ini adalah :Pasal 155 (2) HIR. 128 R.Bg. dan 1940. 1941 BW.
3. Sumpah pemutus yang mendasari jenis sumpah ini adalah pasal-pasal 156 HIR. 183 R.Bg. dan 1930 BW.

Adapun dasar hukum sumpah yang terdapat dalam hukum Islam pada umumnya menekankan pada keabsahannya tanpa merinci jenis atau macamnya hal ini sebagaimana firman-firman Allah SWT., dalam QS. Al-Maidah: 5 : 96, al-Baqoroh:2 : 225.

Di bawah ini dikutip Firman Allah dalam surat Al-Maidah sebagai berikut :

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah, yan tidak dimaksud (untuk bersumpah) tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang kamu sengaja.

## **C. Masalah-masalah yang Memerlukan Alat Bukti Sumpah**

Masalah keperdataan yang timbul sengketa dalam masyarakat, sebagian penyesuaiannya dengann jalan damai baik melalui pendekatan kekeluargaan yang akad perdamaianya disaksikan oleh sanak famili, maupun dengan suatu akad damai yang proses perdamaianya melalui legalisasi pihak pengadilan, namun tidak jarang salah satu pihak yang paling merasa dirugikan menggugat tergugat ke pengadilan. Akibat dari gugatan ini adalah kedua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan bukti-bukti kebenaran obyek gugatan sengketa

tersebut, yang selanjutnya bukti-bukti tersebut di sebut alat bukti.

Dalam hukum Acara Perdata ada beberapa alat bukti diantaranya adalah alat bukti sumpah. Masalah-masalah yang dapat dibuktikan dengan alat sumpah adalah terbatas pada 3 (tiga) masalah yaitu bila terjadi perselisihan mengenai hak milik, utang-piutang dan masalah warisan.

Alat bukti sumpah dalam hukum Islam sangat dibatasi fungsinya yaitu hanya mengenai harga benda dan sesuatu yang bernilai material.

Hal ini mengingat bahwa alat bukti sumpah adalah alat bukti yang sangat mungkin untuk disisipi kedustaan atau kepalsuan, adanya kemungkinan ini diakui oleh para pakar Hukum Acara Perdata maupun hukum Islam.

Adapun nilai pembuktian alat bukti sumpah dalam Hukum Acara Perdata dan hukum Islam mempunyai derajat yang berbeda sehingga secara hirarkis kedua hukum tersebut menempatkan pada peringkat yang berbeda pula.

Hukum acara Perdata menempatkan alat bukti sumpah pada peringkat ke-5, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Kadir Mhammad SH. Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", sebagai berikut: ada Lima alat bukti dalam perkara perdata yaitu : Alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan pengakuan dan sumpah"/

Adapun hukum Islam menempatkan sumpah sebagai alat bukti pada peringkat ke-3 dari tujuh alat bukti yang ada, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddiegy dalam bukunya Peradilan dan hukum acara Islam.

Para Ulama, berpendapat bahwa hujjah (bukti-bukti) atau ada 7 macam; 1. Iqrar (pengakuan). 2. Syahadah (kesaksian). 3. Qasamah (bersumpah). 4. Nukul (menolak sumpah). 5. Qasamah (Bersumpah 50 orang) and sick. 6. Ilmu (pengetahuan hakim). 7. Karimah. Karimah yang dapat dipergunakan.



#### **D. Status Keputusan Hakim Bila Datang Alat Bukti Yang Lebih Kuat Setelah Sumpah**

Alat bukti sumpah dalam Hukum Acara Perdata ada tiga macam yang secara fungsional dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

Pertama adalah alat bukti sumpah yang hanya berfungsi sebagai pelengkap terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara yang fungsi pokoknya hanya melengkapi dan menyempurnakan pembuktian, disisi lain membuka peluang adanya peninjauan kembali bila dikemudian hari gugatan yang diputus dengan alat bukti sumpah pelengkap dan penaksir ditemukan alat bukti baru yang nilai pembuktiannya lebih tinggi.

kedua adalah alat bukti sumpah yang fungsinya sangat vital dan menentukan dengan kata lain alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar suatu putusan tanpa disertai alat bukti lain, alat bukti sumpah ini disebut alat bukti sumpah pemutus, cirikhas dari sumpah ini ada dua;

Pertama tentang penamaanya yang dikaitkan dengan agama atau kepercayaan, sipengangkat sumpah dan yang kedua adalah akibat hukum yang ditimbulkan setelah pengangkatan sumpah ini adalah mempunyai nilai kebenaran obyek sumpah atau apa yang dinyatakan dalam redaksi sumpah ini menjadi pasti, bahkan pihak lain yang mengetahui bahwa sipengangkat sumpah pemutus ini dusta tidak diberi wewenang oleh hakim untuk mengajukan suatu upaya hukum lain guna membatalkan putusan-nya.

Dalam hubunganya dengan adanya beberapa kitab undang-undang Hukum di Indoneisa, ada satu kesempatan lagi bagi pihak yang dirugikan dengan pengangkatan sumpah pemutus itu yaitu ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tentang adan ya unsur penipuan yang telah menipu dirinya yaitu berupa delik aduan (tindak pidana).

Dalam hukum islam sumpah sebagai alat bukti adalah sudah menjadi kesepakatan ulama' baik tentang obyek sumpah sipengangkat sumpah, maupun tempat pengangkatan sumpahnya.

Adapun penamaan sumpah sebagai alat bukti dengan nama-nama tertentu yang dikaitkan dengan kepercayaan sipengangkat sumpah tidak dikenal dalam hukum Islam.

Secara fungsional alat bukti sumpah dibagi menjadi 3 (tiga) macam: yang pertama yaitu sumpah yang fungsinya hanya melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh pihak-pihak, dan sebagai tindakan kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan yang disebut sumpah Istidzhar, kedua sumpah yang dikhususkan untuk suatu gugatan yang berkenaan langsung dengan keterlibatan atau perbuatan sipengangkat sumpah yang fungsinya memutuskan sesuatu gugatan bila penggugat tidak memiliki alat bukti sama sekali menyuruh tergugat untuk mengangkat sumpah gugatan terhadap dirinya.

Ulama bersepakat bahwa bila hakim telah menjatuhkan suatu putusan berdasarkan bukti sumpah baik sumpah istidzhar alal bat maupun sumpah madda'a alaih dikemudian hari ditemukan alat bukti yang lebih kuat pembuktiannya dari alat bukti sumpah hal ini membuka peluang untuk diadakan upaya bukan baru guna memperbaiki keputusan hakim terdahulu.

Berdasarkan analisis tentang tinjauan hukum islam pada alat bukti sumpah dalam hukum Acara Perdata dapat dikemukakan bahwa sumpah sebagai alat bukti dalam hukum Islam dan Hukum Acara Perdata terdapat persamaan dan perbedaan, adapun sumber perbedaannya adalah bersumber dari kedua sumber hukum tersebut, yaitu bila hukum islam sumbernya adalah Al-qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiys. Sedangkan Hukum Acara Perdata adalah BW. HIR. R. Bg. UU. No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Yurisprudensi, SEMA dan lain-lain.



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG **ALAT BUKTI SUMPAH** DALAM HUKUM ACARA PERDATA

**I**slam sebagai agama samawi memberikan syarat dibenarkannya sumpah sebagai alat bukti terhadap perkara yang dijadikan sumpah ada dua: Pertama, merupakan sesuatu yang akan datang (belum terjadi). Kedua, perkara yang dijadikan sumpah itu termasuk sesuatu yang mungkin terjadi saat ia mengucapkan sumpahnya.

Dalam Khazanah Hukum Acara Perdata di Indonesia, pihak-pihak yang berperkara dimungkinkan menggunakan sumpah sebagai alat bukti, baik berupa sumpah pemutus atau yang menentukan suatu perkara dimenangkan oleh salah satu pihak berdasarkan sumpah tersebut, sumpah penaksir atau yang dengan sumpah tersebut ganti kerugian salah satu pihak ditentukan dan sumpah pelengkap atau dalam kondisi tertentu berdasarkan alat bukti yang ada, hakim membutuhkan penguatan keyakinannya dari para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam menentukan dictum-diktum putusan perkaranya.

Sumpah sebagai alat bukti yang tergolong lemah, juga dihadapkan pada suatu realitas ketika perkara sudah dijatuhkan putusan, pihak lawan yang berperkara menemukan novum (alat bukti baru), bagaimanakah pengumpulan yurisdiksinya? Silahkan dicari jawabannya dalam buku sederhana ini.